

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat-Obatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Prambon Nganjuk

Berdasarkan hasil temuan sebelumnya, secara keseluruhan penerapan sistem informasi akuntansi persediaan obatan-obatan pada UPTD Puskesmas Prambon berjalan dengan cukup baik. Pencatatan persediaan dilakukan menggunakan manual dan komputerisasi. Puskesmas Prambon telah mengoperasikan Sistem *Management* Informasi dan Pelaporan Elektronik (SMILE) sehingga lebih mudah bagi karyawan dalam mengelola pencatatan persediaan dan melakukan pelaporan. Program tersebut terhubung dengan dinas kesehatan serta setiap unit bagian di Puskesmas yang memiliki akses dan dinilai dapat menghasilkan informasi yang lebih baik.

Menurut Susanto salah satu unsur sistem informasi akuntansi yang digunakan saat terjadinya peristiwa transaksi, pencatatan, sampai dengan pelaporan adalah adanya peralatan, dapat berupa catatan, formulir, data laporan, atau teknologi komputer. Karena keberadaan komputer dapat mempermudah dalam mengolah data, serta meningkatkan perhitungan dan kecermatan bentuk informasi.¹

¹ Nur Azizah Achmad, *Analisis Peranan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Alat – Alat Kesehatan dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Rawat Inap (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Bahtermas Provinsi Sulawesi Tenggara)...*, hal. 63.

Prosedur pengadaan persediaan dimulai dengan perencanaan oleh petugas pelaksana kefarmasian bersama petugas yang berkaitan, kemudian melakukan permintaan obat melalui LPLPO dan dikirimkan ke GFK untuk disiapkan. Apabila tidak tersedia, Bendahara JKN dapat membeli secara mandiri dengan membawa surat pesanan obat tertentu dari dinas. Kemudian petugas pelaksana kefarmasian menerima obat-obatan dengan mencocokkan SBBK dengan fisik barang dan membuat berita acara penerimaan.

Setelah barang diterima dilakukan penyimpanan di gudang sesuai SOP dan melakukan pencatatan di kartu gudang dan SMILE. Sementara itu, pendistribusian obat pada subunit menggunakan LPLPO subunit dan pada kamar obat pengeluarannya didasarkan resep yang dituliskan pada Lembar Permintaan Obat (LPO). Kemudian pemantauan dilakukan dengan melakukan *stock opname* dan untuk obat-obatan yang rusak akan dicatat dan dikirim kembali ke dinas kesehatan untuk dimusnahkan.

Prosedur pengelolaan persediaan tersebut dijalankan sesuai SOP serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, kegiatannya meliputi: perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai.²

² Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Penerapan sistem dan prosedur yang dijalankan tersebut berbeda dengan teori yang ada. Menurut Sujarweni sistem dan prosedur dalam sistem akuntansi persediaan meliputi:³

- a. Prosedur pencatatan barang/produk jadi
- b. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual
- c. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan
- d. Prosedur permintaan pengeluaran barang gudang

Sistem dan prosedur tersebut memiliki bagiannya masing-masing yang terstruktur dengan jelas dan terdiri dari: bagian produksi, gudang, akuntansi, dan manajer.⁴ Sementara dalam praktiknya, Puskesmas Prambon merupakan organisasi yang melakukan aktivitas pelayanan dan tidak melakukan kegiatan produksi, Selain itu pelaporan persediaan obat-obatan dikelola langsung oleh penanggung jawab pelaksana kefarmasian, bagian keuangan, dan kepala puskesmas. Meskipun memiliki perbedaan namun tujuan kerjanya sama.

Dalam mengelola persediaan petugas pelaksana kefarmasian memiliki peran yang besar melakukan perencanaan sampai pendistribusian, pencatatan di kartu gudang maupun di SMILE, serta melakukan kegiatan *stock opname*. Hal tersebut, sama saja dengan mengevaluasi tugasnya sendiri sehingga dapat menimbulkan risiko, seperti pada aktivitas pencatatan dan *stock opname* yang dilakukan oleh petugas yang sama dapat menimbulkan kecurangan atau kesalahan dalam pencatatan. Namun selama ini tidak terjadi tindakan

³ V. Wiratna Sujarweni. *Sistem Akuntansi...*, hal. 140-141.

⁴ *Ibid...*, hal. 140-141.

kecurangan karena petugas mampu mengatur tugasnya dengan baik. Meskipun begitu sebaiknya dilakukan oleh petugas yang berbeda atau membentuk panitia selain petugas pemegang kartu gudang.

Sementara itu, dokumen yang digunakan dalam mengelola persediaan bervariasi, terdapat Lembar Permintaan dan Laporan Pemakaian Obat (LPLPO), laporan narkotik dan psikotropika, laporan obat rasional, dan laporan pertanggung jawaban pembelian obat. Laporan tersebut nantinya berperan dalam penyusunan laporan keuangan Puskesmas. Secara teori dokumen yang digunakan oleh milik Sujarweni adalah berupa dokumen manual.⁵ Sedangkan pada Puskesmas sebagian menggunakan *output* yang dicetak dari Sistem *Management* Informasi dan Pelaporan Elektronik (SMILE) serta dokumen yang di *input* secara manual ke dalam komputer. Selain itu terdapat dokumen pendukung seperti bukti transaksi pembelian obat, surat pengajuan dan pesanan pembelian, kartu gudang. Dokumen pendukung tersebut merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti sahnya transaksi yang berkaitan dalam dokumen sumber.⁶

Hasil penelitian mendukung secara konsisten dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhasanah,⁷ terkait penerapan sistem informasi akuntansi persediaan obat dalam mencegah kecurangan pada Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari empat Puskesmas telah

⁵ V. Wiratna Sujarweni. *Sistem Akuntansi...*, hal. 140-141.

⁶ Mirza Maulinarhadi Ranatarisza dan Max advian Noor, *Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi pada Administrasi Bisnis*, (Malang: UB Press, 2013), hal. 97.

⁷ Siti Nurhasanah, Ismet Ismatullah, dan Venita Sofiani, *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat dalam Pencegahan Kecurangan pada Puskesmas...*, hal. 52-58.

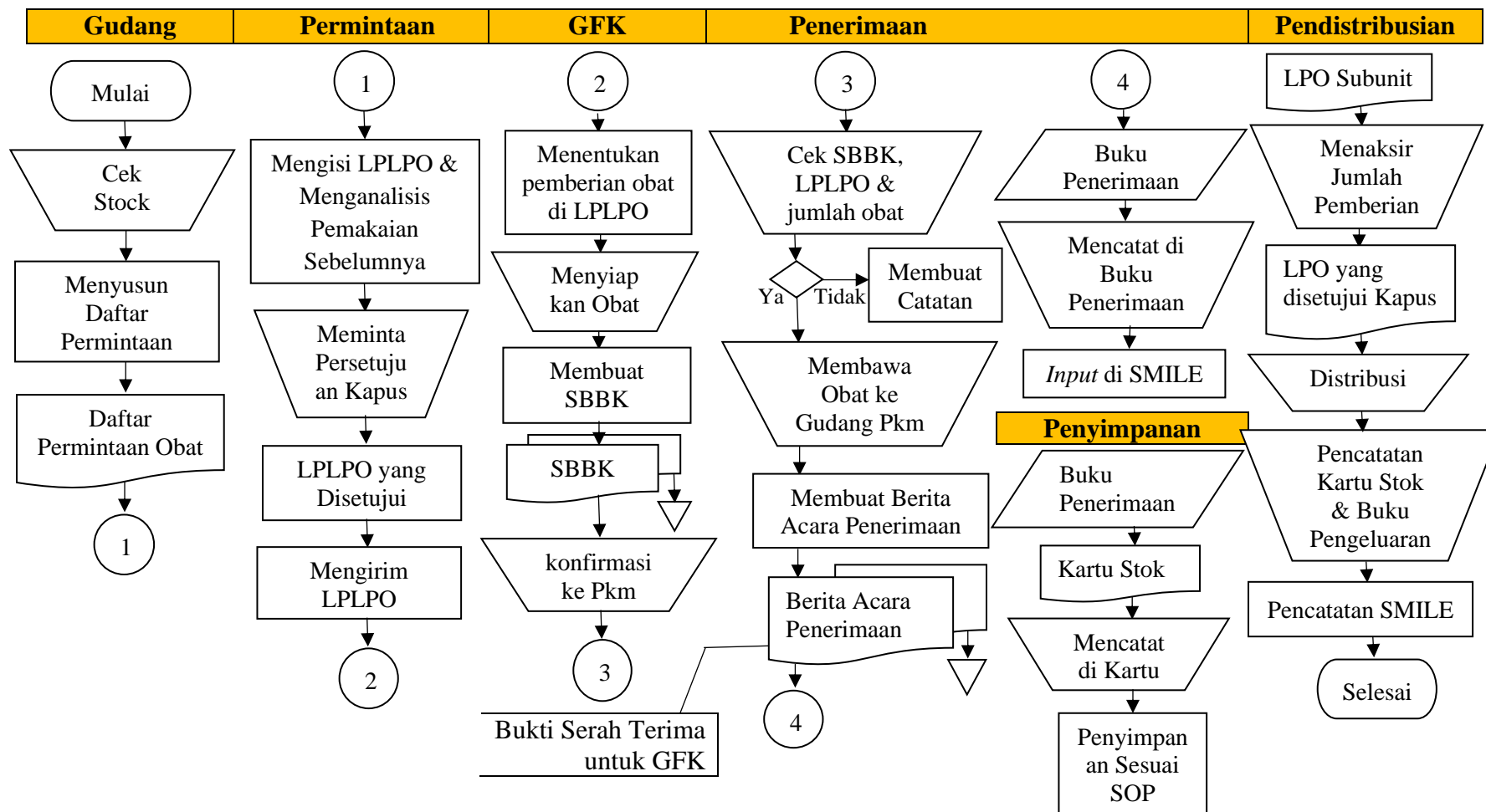
menerapkan sistem informasi akuntansi dalam mengelola persediaan obat, dan efektif untuk mencegah kecurangan, kendala yang dialami yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sedangkan di UPTD Puskesmas Prambon sarana dan prasarana sudah memadai, namun dalam menjalankan fungsi perencanaan sampai pendistribusian persediaan masih terdapat rangkap tugas sehingga berisiko menghasilkan informasi yang memiliki tingkat kesalahan yang tinggi.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh achmad,⁸ terkait peranan sistem informasi akuntansi persediaan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan layanan rawat inap di RSU Bahteramas, yang menyatakan bahwa dalam penerapannya telah memadai karena indikator sistem informasi akuntansi persediaan terpenuhi berupa sumber daya manusia dengan memperhatikan kualitas pegawainya, adanya peralatan berupa formulir, laporan, dan perangkat komputer, serta metode. Metode tersebut berupa sistem dan prosedur dalam mengelola alat kesehatan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang.

Berikut rekomendasi *flowchart* persediaan obat-obatan umum yang dapat digunakan:

⁸ Nur Azizah Achmad, *Analisis Peranan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Alat – Alat Kesehatan dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Rawat Inap (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara)...*, hal. 63.

Gambar 5.1
Flowchart Persediaan Obat-Obatan Umum



Keterangan:

Flowchart di atas dapat digunakan untuk membantu dalam mengelola persediaan obat-obatan pada Puskesmas Prambon agar berjalan lebih baik. Timbulnya persediaan obat-obatan pada Puskesmas dikarenakan adanya permintaan sampai pengeluaran obat-obatan. Maka dari itu, terdapat bagian-bagian yang berkaitan dengan persediaan.

Pada awalnya pihak gudang melakukan pengecekan terhadap stok obat-obatan, setelah itu menyusun daftar permintaan obat-obatan yang telah menipis dan menyerahkannya kepada petugas. Kemudian petugas mengisi LPLPO dengan menganalisis pemakaian obat-obatan sebelumnya dan meminta persetujuan Kepala Puskesmas (Kapus) untuk melakukan permintaan kepada GFK. Setelah LPLPO disetujui petugas baru mengirimkan LPLPO melalui perangkat komputer kepada GFK.

Selanjutnya GFK akan menerima LPLPO dari Puskesmas dan menentukan jumlah pemberian dengan beberapa pertimbangan seperti rasio pemakaian dan stok di gudang GFK. Setelah itu GFK menyiapkan obat-obatan sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan menyiapkan SBBK sebagai bukti, dicetak dua kali untuk dijadikan arsip dan diserahkan pada Puskesmas. Pihak GFK kemudian menghubungi Puskesmas untuk mengambil obat-obatan.

Setelah mendapat konfirmasi dari GFK, petugas Puskesmas mengambil dan menerima obat-obatan. Terlebih dahulu dilakukan pengecekan dengan mencocokkan SBBK, LPLPO, serta jumlah fisik obat-obatan. Untuk SBBK

dibuat rangkap 2 untuk Puskesmas dan arsip dinas. Apabila tidak sesuai maka petugas dapat membuat catatan dan pemberiannya dilakukan di waktu yang akan datang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pihak Puskesmas dapat membawa barang ke gudang Puskesmas. Selanjutnya membuat berita acara penerimaan dan dicetak dua kali yang digunakan sebagai bukti serah terima antara pihak Puskesmas dengan GFK.

Obat-obatan yang telah dibawa akan dicatat terlebih dahulu secara manual ke dalam buku penerimaan, kemudian dimasukkan ke program SMILE. Berdasarkan dari buku penerimaan dilakukan pencatatan pada kartu stok gudang dan melakukan prosedur penyimpanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Puskesmas.

Pada proses distribusi dimulai dengan Lembar Permintaan Obat yang diserahkan oleh subunit, petugas akan memperhitungkan jumlah pemberian yang akan diberikan dan diketahui oleh Kapus, setelah disetujui petugas melakukan distribusi dan melakukan pencatatan secara manual dan komputerisasi pada buku pengeluaran, kartu stok gudang, serta program SMILE. Setelah itu LPLPO akan dikirimkan ke dinas sebagai bentuk laporan sekaligus permintaan persediaan obat-obatan untuk waktu yang akan datang.

B. Penerapan Pengendalian Internal Persediaan Obat-Obatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Prambon Nganjuk

Berdasarkan temuan penelitian, secara keseluruhan penerapan pengendalian internal pada UPTD Puskesmas Prambon dalam menangani persediaan obat-obatan dapat berjalan dengan cukup baik. Berikut ini penerapan pengendalian internal persediaan obat-obatan pada UPTD Puskesmas Prambon berdasarkan praktek yang ada dengan teori komponen-komponen pengendalian internal:

1. Lingkungan Pengendalian Persediaan Obat-Obatan pada UPTD Puskesmas Prambon Nganjuk

Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana di dalam organisasi untuk menjalankan struktur pengendalian intern yang baik.⁹ Dalam hal ini, Puskesmas Prambon memiliki visi dan misi untuk diwujudkan bersama. Oleh karena itu setiap karyawan menjunjung tinggi komitmen atas integritas dan nilai etika dan menjadikan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaannya.

Penerapan SOP dalam mengelola persediaan berjalan cukup baik, mulai dari perencanaan sampai penyimpanan obat di gudang, serta proses pemusnahan obat kedaluwarsa dijalankan berdasarkan SOP. Kemudian setiap dokumen atau laporan khususnya mengenai persediaan memuat informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu

⁹ V. Wiratna Sujarweni. *Sistem Akuntansi...*, hal. 71.

Puskesmas Prambon memiliki gaya beroperasi tersendiri yaitu: “Sehat Empati Nyaman untuk Masyarakat”, yang sampai ini menjadi motto bagi karyawan untuk menjalankan pekerjaannya dalam melayani masyarakat.

Kemudian struktur organisasi pada Puskesmas digunakan untuk mengetahui semua divisi atau bagian masing-masing dalam menjalankan tugas di lingkup UPTD Puskesmas Prambon. Struktur organisasi di Puskesmas Prambon disusun oleh Kepala Puskesmas dan disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Struktur organisasi mencerminkan distribusi tanggung jawab, otoritas, dan akuntabilitas organisasi.¹⁰

Struktur organisasi pada Puskesmas berjalan secara fungsional karena wewenang dan tanggung jawab terlihat jelas dalam aktivitas operasional. Pemberian tanggung jawab diberikan kepada karyawan berdasarkan keahlian yang dimiliki, serta terdapat anggaran tersendiri untuk mengadakan pelatihan bagi karyawan agar kinerjanya meningkat.

Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Puskesmas beserta para penanggung jawab seperti Kepala Tata Usaha, UKP dan UKM serta Dinas Kesehatan. Selain itu, Puskesmas juga memiliki pengaruh eksternal untuk memenuhi target yang direncanakan, seperti adanya kegiatan lintas sektor yang melibatkan polisi dan TNI setempat. Pengaruh eksternal yang memengaruhi lingkungan pengendalian merupakan persyaratan yang diberikan oleh bursa efek,

¹⁰ Atyanto Mahatmyo, *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar...*, hal. 16.

lembaga perbankan, instansi perpajakan, dan lembaga pemerintah lainnya yang memengaruhi atas jalannya organisasi.¹¹

Secara teori lingkungan pengendalian memiliki beberapa faktor berikut ini:¹²

- a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
- b. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi.
- c. Struktur Organisasi.
- d. Metode pembagian tugas dan tanggung jawab.
- e. Kebijakan dan praktik menyangkut sumber daya manusia.
- f. Pengaruh dari luar (eksternal).

Hasil penelitian mendukung secara konsisten dari penelitian yang dilakukan Makisurat,¹³ mengenai penerapan sistem pengendalian intern untuk persediaan barang dagang pada CV Multi Media Persada Manado yang menyimpulkan bahwa lingkungan pengendalian sudah dilaksanakan dengan baik, dimana struktur organisasi yang ada berjalan secara fungsional, setiap laporan memuat informasi yang benar dan wajar, serta tanggung jawab yang diberikan berdasarkan keahlian karyawan.

¹¹ Rizki ahmad fauzi, *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 71.

¹² V. Wiratna Sujarweni. *Sistem Akuntansi...*, hal. 71-72.

¹³ Aprilia Makisurat dan Jenny Morasa dan Inggriana Elim, *Penerapan Pengendalian Intern untuk Persediaan Barang Dagangan pada CV. Multimedia Persada Manado...*, hal. 1151-1161.

2. **Aktivitas Pengendalian Persediaan Obat-Obatan pada UPTD Puskesmas Prambon Nganjuk**

Aktivitas pengendalian merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen organisasi untuk menegakkan pengendalian atau pengawasan operasi organisasi.¹⁴ Pada Puskesmas Prambon persediaan obat-obatan dikelola oleh petugas dari kamar obat atau disebut pelaksana kefarmasian. Dimana salah satunya sebagai koordinator yang bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan, permintaan dan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, *stock opname*, serta melakukan pencatatan baik secara manual maupun dalam program SMILE. Sedangkan petugas lainnya membantu dalam melakukan penerimaan, penyimpanan, atau pendistribusian. Kemudian, pada fungsi pembelian obat dilakukan oleh bagian keuangan khususnya oleh Bendahara JKN.

Hal ini menandakan bahwa pemisahan tugas pada Puskesmas belum cukup baik, karena adanya rangkap tugas. Akibatnya ada tumpang tindih pekerjaan, sehingga risiko kerancuan atau kecurangan akan lebih besar muncul. Akan tetapi, selama ini petugas mampu menjalankan dan mengatur tugasnya dengan baik. Meskipun begitu sebaiknya pemisahan tugas diterapkan dengan baik atau dilakukan penambahan petugas. Pemisahan tugas merupakan salah satu syarat pengendalian internal yang baik, hal ini dikarenakan agar tidak ada pegawai yang diberi tanggung

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni. *Sistem Akuntansi...*, hal. 72.

jawab terlalu banyak sehingga dapat melakukan penipuan atau menyembunyikan penipuan.¹⁵

Sedangkan untuk otorisasi transaksi dilakukan dengan baik, dikarenakan ada pembubuhan tanda tangan pada dokumen atau laporan yang dilakukan oleh orang yang berwenang seperti Kepala Puskesmas. Selain itu, dokumen dan catatan yang digunakan untuk mengawasi persediaan pada Puskesmas Prambon juga memiliki identitas yang jelas seperti tercantum nama, tanggal, serta bernomor urut. Otorisasi transaksi digunakan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang valid yang akan diproses.¹⁶

Perlindungan fisik persediaan pada Puskesmas dilakukan dengan cukup baik, karena tersedianya gudang sebagai tempat penyimpanan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti pemberian rak, AC, alat pemadam kebakaran, serta adanya pembatasan akses ke gudang. Namun, kondisi gudang saat ini dinilai terlalu lembap sehingga dapat mempengaruhi mutu, untuk mengatasinya pihak Puskesmas sedang membangun gudang yang baru. Selain itu pihak Puskesmas mengadakan evaluasi untuk menjamin ketersediaan obat terhadap formularium setiap 6 bulan sekali.

¹⁵ Rizki ahmad fauzi, *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)...*, hal. 72.

¹⁶ James A Hall, *Accounting Information Systems (Sistem Informasi Akuntansi)*, Terj. Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 244.

Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Manengkey,¹⁷ mengenai sistem pengendalian intern persediaan barang dagang pada PT. Cahaya Mitra Alkes bahwasanya pada aktivitas pengendalian dilakukan dengan cukup baik, adanya otorisasi transaksi dilakukan oleh yang berwenang dan pengendalian akses pada gudang. Namun untuk pemisahan tugas, dalam penelitian masih belum diterapkan dengan baik.

3. Penilaian Risiko Persediaan Obat-Obatan pada UPTD Puskesmas Nganjuk

penilaian risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh organisasi. Apabila risiko dapat dipahami dengan baik, maka manajemen dapat mengambil tindakan yang tepat guna pencegahan, sehingga organisasi dapat menghindari kerugian yang besar.¹⁸ Dalam praktiknya Puskesmas Prambon menilai persediaannya dengan memperhatikan mutu serta masa kedaluwarsa obat agar tidak menimbulkan pemberian obat-obatan yang salah atau membahayakan bagi pasien.

Oleh karena itu, Puskesmas Prambon menggunakan dua metode yaitu FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*) dalam penyimpanan obat-obatan di gudang, sehingga risiko dapat diminimalisir. Obat-obatan yang sudah atau mendekati kedaluwarsa akan

¹⁷ Natasya Manengkey, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang dan Penerapan Akuntansi pada PT. Cahaya Mitra Alkes...*, hal.13-21.

¹⁸ V. Wiratna Sujarweni. *Sistem Akuntansi...*, hal. 73.

dicatat kemudian dikirim ke dinas kesehatan untuk dimusnahkan. Selain itu setiap barang di gudang memiliki kartu gudang masing-masing, sehingga apabila ada perpindahan dari gudang selalu dilakukan pencatatan.

Pada Kamar Obat pencatatan juga dilakukan secara terus-menerus apa saja obat yang telah keluar. Selain itu, Puskesmas Prambon rutin melakukan *stock opname* (perhitungan fisik). Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan yang dialami petugas adalah kesulitan dalam melakukan pencatatan apabila terdapat obat-obatan kedaluwarsa. Berikut ini rekomendasi kartu gudang:

Gambar 5.2
Kartu Gudang

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS PRAMBON Jl. Raya Sangrahan No. 2 Kec. Prambon 64484										
<u>KARTU STOK</u>										
Nama Barang : Satuan : Kemasan : Kode Barang : Tempat Penyimpanan :										
Tgl	Nomor S.P	E.d	Harga	Masuk		Keluar		Sisa	Paraf	Ket
				Dari	Jmlh	Ke	Jmlh			

Sumber: Data Diolah, 2020.

Kartu gudang di atas dapat dimanfaatkan sebagai kartu gudang yang baru, berisi informasi-informasi yang lebih spesifik dan jelas seperti tercantum tanggal kedaluwarsa obat, sehingga dapat memudahkan petugas dalam mengecek persediaan obat-obatan.

Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Fajar,¹⁹ mengenai sistem pengendalian intern terhadap persediaan obat

¹⁹ Achmarul Fajar dan Helman Suprpto dan Ana Mara Qonita, *Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Persediaan Obat untuk Pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di UPT Puskesmas Kowel...*, hal. 48-66.

untuk pasien BPJS pada UPT Puskesmas Kowel mengatakan bahwa penilaian risiko yang dilakukan cukup baik, dengan menerapkan metode FIFO dan FEFO untuk menyimpan obat-obatan di gudang sehingga risiko obat kedaluwarsa dapat diperkecil.

4. Informasi dan Komunikasi Persediaan Obat-Obatan pada UPTD Puskesmas Prambon Nganjuk

Komponen Informasi dan komunikasi berisi rancangan sistem informasi organisasi yang memuat beberapa hal seperti bagaimana transaksi diawali; bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap di *input* ke komputer atau langsung dikonversi ke komputer; sebagaimana informasi yang baik dilakukan, serta bagaimana informasi diolah untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan.²⁰

Penerapan informasi dan komunikasi di Puskesmas Prambon secara lisan maupun secara fisik berupa dokumen sudah baik. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi antar karyawan apabila ada ketidakcocokan, adanya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta setiap laporan yang dihasilkan berisi informasi yang dapat dijamin kebenarannya dan disertai dengan dokumen pendukung yang diotorisasi pihak yang berwenang.

Puskesmas Prambon juga sudah menerapkan sistem informasi dan komunikasi berbasis komputer yaitu dioperasikannya Sistem *Management* Informasi dan Elektronik Puskesmas (SMILE). Program

²⁰ V. Wiratna Sujarweni. *Sistem Akuntansi...*, hal. 73.

SMILE dapat memudahkan karyawan Puskesmas untuk melakukan pelayanan, pencatatan serta pelaporan secara elektronik. Program SMILE juga terhubung dengan dinas kesehatan serta setiap bagian di Puskesmas yang memiliki *username* dan *password*.

Hasil penelitian diatas mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Fajar,²¹ mengenai sistem pengendalian intern terhadap persediaan obat untuk pasien BPJS pada UPT Puskesmas Kowel menyimpulkan bahwa pada komponen informasi dan komunikasi dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan evaluasi serta prosedur yang jelas.

5. Pengawasan Persediaan Obat-Obatan pada UPTD Puskesmas Prambon Nganjuk

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang menyimpang, sehingga diharapkan dapat diambil dengan segera tindakan yang tepat.²² Pengawasan pada Puskesmas dilakukan oleh kepala puskesmas sendiri dan pengawasan pada persediaan obat-obatan di gudang dilakukan oleh petugas pelaksana kefarmasian, kemudian mengadakan rapat bersama karyawan setiap satu bulan sekali untuk melakukan evaluasi .

Selain pihak internal, pengawasan juga dilakukan oleh pihak eksternal yaitu dinas kesehatan dan pihak yang lebih tinggi

²¹ Achmarul Fajar dan Helman Suprpto dan Ana Mara Qonita, *Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Persediaan Obat untuk Pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di UPT Puskesmas Kowel...*, hal. 48-66.

²² V. Wiratna Sujarweni. *Sistem Akuntansi...*, hal. 74.

kedudukannya. Pada persediaan obat-obatan selalu dilakukan pengawasan berupa pemeriksaan secara mendadak oleh dinas kesehatan biasanya untuk memeriksa hasil *stock opname* gudang farmasi Puskesmas. Sedangkan aktivitas *stock opname* pada Puskesmas dilakukan secara rutin satu bulan sekali. Hasil penelitian diatas mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Manengkey,²³ mengenai sistem pengendalian intern persediaan barang dagang pada PT. Cahaya Mitra Alkes bahwasanya pada komponen pengawasan persediaan dilakukan dengan baik yaitu adanya aktivitas *stock opname* secara periodik.

C. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Persediaan Obat-Obatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Prambon Nganjuk

Efektivitas dapat dijadikan sebagai ukuran berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai sasaran. Apabila suatu organisasi berhasil dalam mencapai sasarannya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Yamit efektivitas adalah ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai baik secara kualitas maupun waktu, dan orientasinya pada keluaran (*output*) yang dihasilkan.²⁴ Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal persediaan dapat mencapai efektivitas apabila penerapannya dilakukan sesuai

²³ Natasya Manengkey, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang dan Penerapan Akuntansi pada PT. Cahaya Mitra Alkes...*, hal.13-21.

²⁴ Suroso, *Evaluasi Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Infomedia Nusantara Medan...*, hal. 32.

dengan komponen penyusunnya dan pengaturan kegiatan yang baik pada berbagai tingkat operasi yang dijalankan, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian sebagai berikut:²⁵

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Puskesmas Prambon memiliki kejelasan tujuan yang hendak dicapai yaitu mewujudkan visi dan misi. Disamping itu, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal persediaan bertujuan untuk melindungi dan memberikan informasi mengenai pengelolaan persediaan obat-obatan yang dimiliki.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi yang digunakan Puskesmas Prambon adalah dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengelola persediaan obat-obatannya yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3. Penyusunan program yang tepat

Dalam hal ini, berkaitan dengan pengelolaan pencatatan dan pelaporan, Puskesmas Prambon telah menggunakan Sistem Manajemen

²⁵ Lutfiyah dan Zuraidah, *Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berbasis Software di Koperasi As-Sakinah 'Aisyah Kota Malang...*, hal. 609.

Informasi dan Pelaporan Elektronik Puskesmas (SMILE) untuk memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan.

4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Sarana dan prasana yang dimiliki Puskesmas Prambon cukup memadai, meliputi gudang sebagai tempat penyimpanan persediaan obat, kartu stok gudang, rak dan lemari khusus untuk obat-obatan, serta ruang kerja yang dilengkapi dengan komputer rak untuk menyimpan dokumen.

5. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Pelaksanaan prosedur pengadaan persediaan sudah dilengkapi dengan dokumen berupa formulir dan laporan persediaan. Namun pada aktivitas pencatatan dan *stock opname* masih dilakukan oleh petugas yang sama sehingga kurang efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada.

6. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang digunakan untuk mengukur keefektifan adalah menggunakan komponen pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO yang terdiri dari 5 komponen:

Tabel 5.1
Efektivitas pengendalian internal

Komponen Pengendalian Internal	Sub Komponen	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika	a. Adanya Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam bekerja b. Adanya absen rutin setiap pagi untuk mendorong karyawan agar datang tepat waktu.
	Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi	Menggunakan motto yaitu “Sehat Empati Nyaman untuk Masyarakat” sebagai gaya beroperasi bagi karyawan.
	Struktur Organisasi	a. Adanya struktur organisasi pada Puskesmas yang jelas dan mudah dipahami, namun masih ada yang merangkap jabatan. b. Adanya struktur tersendiri pada kamar obat yang mengelola persediaan obat.
	Metode pembagian tugas dan tanggung jawab	Metode pembagian tugas dan tanggung jawab diberikan sesuai dengan struktur organisasi
	Kebijakan dan praktik menyangkut Sumber Daya Manusia	Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai
	Pengaruh dari luar	Adanya kegiatan kerjasama lintas sektor.
Aktivitas Pengendalian	Pemberian otorisasi	Adanya pembubuhan tanda tangan pada pada dokumen yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti Kepala Puskesmas, Bendahara, dan Petugas Pelaksana Kefarmasian.
	Pemisahan tugas dan tanggung jawab	Pemisahan tugas belum diterapkan dengan baik, masih adanya rangkap tugas.
	Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai	Dokumen dan catatan memiliki identitas yang jelas seperti tercantum nama, tanggal, serta bernomor.
	Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan	a. Adanya gudang untuk menyimpan persediaan. b. Adanya pembatasan akses ke gudang dan pemberian fasilitas seperti rak, AC, dan alat pemadam kebakaran. Namun

		kekurangannya adalah kondisi gudang yang terlalu lembab sehingga dapat mempengaruhi kualitas persediaan yang disimpan.
	Pemeriksaan independen terhadap kinerja	Belum adanya pemeriksaan yang independen, karena pemeriksaan masih dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.
Penilaian Risiko		<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan metode FIFO dan FEFO dalam menyimpan obat-obatan untuk menghindari pemberian obat yang rusak atau kedaluwarsa. b. Pemberian kartu gudang pada masing-masing barang di gudang. c. Adanya aktivitas <i>stock opname</i> setiap satu bulan sekali untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok dan sebagai upaya untuk mendeteksi obat-obatan yang rusak atau kedaluwarsa.
Informasi dan Komunikasi		<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya koordinasi antar karyawan apabila terdapat ketidakcocokan. b. Penyusunan SOP sebagai bentuk informasi bagi karyawan. c. Adanya laporan yang disertai dengan dokumen pendukung seperti nota, kwitansi. d. Adanya pengoperasian SMILE untuk melakukan pelayanan, pencatatan, dan pelaporan yang dilengkapi dengan <i>username</i> dan <i>password</i>
Pengawasan		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan di dalam Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan pada persediaan dilakkan oleh pelaksana kefarmasian. Selain itu, diadakannya evaluasi setiap satu bulan sekali. b. Adanya pemeriksaan secara rutin oleh pihak eksternal seperti Dinas Kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal persediaan obat-obatan pada Puskesmas Prambon dapat dikatakan berjalan cukup efektif dikarenakan secara keseluruhan sudah memenuhi ukuran efektivitas, meskipun terdapat unsur-unsur yang belum terpenuhi. Pada aktivitas pencatatan dan *stock opname* sebaiknya tidak dilakukan oleh petugas yang sama, dengan menambah sumber daya manusia atau menugaskan petugas yang lain. Kemudian pada pemisahan tugas pada karyawan sebaiknya diterapkan dengan lebih baik dan melakukan pemeriksaan yang independen pada kinerja.

Selanjutnya agar penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal persediaan obat-obatan dapat berjalan dengan lebih baik, rekomendasi *flowchart* persediaan obat-obatan di atas dapat dijadikan sebagai referensi. Selain itu, kartu stok di atas juga dapat digunakan agar pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan lebih baik, mudah dan berisi informasi-informasi yang lebih jelas.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah,²⁶ mengenai penerapan sistem informasi akuntansi persediaan obat untuk mencegah kecurangan pada Puskesmas, yang menyimpulkan bahwa tiga dari empat Puskesmas telah menerapkan sistem informasi akuntansi pada persediaan obat dengan cukup baik dan efektif untuk mencegah kecurangan.

²⁶ Siti Nurhasanah, Ismet Ismatullah, dan Venita Sofiani, *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat dalam Pencegahan Kecurangan pada Puskesmas...*, hal. 52-58.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Manengkey,²⁷ mengenai sistem pengendalian intern persediaan barang dagang pada PT Cahaya Mitra Alkes menyatakan bahwa secara keseluruhan penerapan pengendalian intern persediaan barang dagang berjalan cukup efektif. Hal ini dikarenakan manajemen sudah menerapkan unsur-unsur pengendalian intern, namun terdapat beberapa prosedur yang belum menggambarkan pengendalian intern.

²⁷ Natasya Manengkey, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang dan Penerapan Akuntansi pada PT. Cahaya Mitra Alkes...*, hal.13-21.